



BUPATI BUTON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 12 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA LAMBUSANGO TIMUR KECAMATAN KAPONTORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan pada Wilayah Desa Lambusango perlu diadakan Pemekaran dengan Pembentukan Desa Lambusango Timur Kecamatan Kapontori ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lambusango Timur Kecamatan Kapontori ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN
DESA LAMBUSANGO TIMUR KECAMATAN KAPONTORI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lambusango Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Lambusango Timur Kecamatan Kapontori dalam Wilayah Kabupaten Buton di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

(1) Wilayah Desa Lambusango Timur terdiri atas :

- a. Dusun Watambo;
- b. Dusun Wabuari.

(2) Pusat Pemerintahan Desa Lambusango Timur berkedudukan di Dusun Watambo.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Lambusango Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka luas Wilayah Desa Lambusango berkurang seluas Wilayah Desa Lambusango Timur.

Pasal 5

(1) Desa Lambusango Timur Kecamatan Kapontori mempunyai batas-batas, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Todanga;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Watumotobe;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Warinta Kecamatan Pasarwajo;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lambusango.

- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan Batas Wilayah Desa Lambusango Timur Kecamatan Kapontori secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Perubahan Nama dan Batas Desa / Dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton berdasarkan usulan masyarakat dengan memperhatikan latar belakang dan nilai-nilai budaya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Lambusango Timur, diangkat seorang Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 2005

BUPATI BUTON,

Ir. H. LM. SJAFAEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 010110307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2005 NOMOR :

**BUPATI BUTON**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA WAGARI KECAMATAN LASALIMU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan perlu diadakan Pemekaran dengan Pembentukan Desa Wagari Kecamatan Lasalimu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Wagari Kecamatan Lasalimu ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN DESA WAGARI KECAMATAN LASALIMU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wagari.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Wagari Kecamatan Lasalimu dalam Wilayah Kabupaten Buton di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

(1) Wilayah Desa Wagari terdiri atas :

- a. Dusun Toruku I;
- b. Dusun Toruku II.

(2) Pusat Pemerintahan Desa Wagari berkedudukan di Dusun Toruko I.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Wagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka luas Wilayah Desa Lawele berkurang seluas Wilayah Desa Wagari.

Pasal 5

(1) Desa Wagari Kecamatan Lasalimu mempunyai batas-batas, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Waoleona;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lawele;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kakenauwe;

- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan Batas Wilayah Desa Wagari Kecamatan Lasalimu secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Perubahan Nama dan Batas Desa / Dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton berdasarkan usulan masyarakat dengan memperhatikan latar belakang dan nilai-nilai budaya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Wagari, diangkat seorang Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 2005

BUPATI BUTON,

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010110307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2005 NOMOR :